

## DAFTAR PUSTAKA

- Apa itu Intensifikasi Pajak? Bagaimana Implementasinya?. Diakses dari : <https://klikpajak.id/en/blog/berita-pajak/intensifikasi-pajak-implementasinya/>
- BKUD Kabupaten Semarang. Diakses dari : <http://bkud.semarangkab.go.id/>
- (2007). UU No.28, Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas UU NO 6. Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- (2009). UU No.28, Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari : [http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU\\_28\\_Tahun\\_2009\\_Ttg\\_PDRD.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)
- (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.52, Tahun 2010. Diakses dari : <https://www.semarangkab.go.id/utama/images/stories/data/aksippk/pengaduanptsp/SKBupatiPendelegasianPerizinan.pdf>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan;Edisi Revisi 2016.Yogyakarta: Andi
- Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13, Tahun 2017. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91493/perda-kab-semarang-no-13-tahun-2017>
- Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Diakses dari : <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Pengertian Pajak. Diakses dari : <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2012). UU Nomor 4, Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Diakses dari : [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_SEMARANG\\_4\\_2012.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SEMARANG_4_2012.pdf)
- Susanti, Agnes Ani.(2019). Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak (Kasus Pajak Restoran di Kabupaten Semarang). Diakses dari : <http://repository.unika.ac.id/19341/>

## LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

### 1. Tujuan Wawancara

Wawancara ditujukan oleh penulis agar penulis dapat secara langsung bias mendapatkan data serta pandangan mengenai pemasangan, penggunaan dan pemanfaatan *POS (PointofSales)* serta dampak yang didapatkan pada Realisasi Pajak Daerah di BKUD Kabupaten Semarang secara akurat dan benar,

### 2. Narasumber

Pada penyusunan laporan ini narasumber penulis adalah seorang pegawai BKUD Kabupaten Semarang di bidang Pajak Daerah yang secara langsung menangani *POS (PointofSales)* yaitu dengan saudara Khabib dan saudara Bintang pada kantor pelayanan pajak.

### 3. Isi Wawancara

Berikut ini wawancara mengenai dampak POS pada realisasi pembayaran pajak daerah :

P : Apakah peningkatan pendapatan pada tahun 2018 dikarenakan adanya *POS*?

N : *POS* dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang membantu, meningkatnya pendapatan pada tahun 2018.

P : Mengapa *POS* dapat menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan?

N : Karena dengan adanya penggunaan *POS*, wajib pajak tidak dapat semena - mena dalam pelaporan perpajakannya.

Berikut ini wawancara mengenai kendala BKUD Kabupaten Semarang dengan adanya *POS*:

P : Kendala apa saja yang dihadapi oleh BKUD dengan adanya penggunaan *POS* ini?

N : Kendalanya bermacam – macam. Baik dari WP dan BKUD

P : Apa saja jika kendala berasal dari WP?

N : Mulai dari WP yang menolak menggunakan *POS*, WP tidak paham sistem *POS*, WP tidak menghidupkan *POS* dan juga tidak di inputkan transaksinya, lalu di BKUD juga masih kurang pegawai untuk mengawasi WP satu per satu.

Berikut ini wawancara mengenai upaya BKUD Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala yang dialami :

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh BKUD untuk mengatasi kendala yang ada ?

N : Tentu saja kami melakukan penyuluhan mengenai *POS* pada WP, lalu kami melakukan pendampingan penggunaan terlebih dahulu, kami juga memberikan servis jika terdapat masalah, lalu kami juga memberikan kertas untuk kasir.

P : Apakah hal – hal tersebut memiliki pungutan biaya?

N : Tidak, semuanya ditanggung oleh pemerintah, pemerintah yang menyediakan.

